BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda.

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset tetap.

Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi tersebut kita kenal dengan nama SAP yang mana merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Didalam SAP tersebut terdapat satu pernyataan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap.Aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aset yang dimiliki oleh pemerintah.Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka aset tetap yang telah dimiliki instansi pemerintah tentunya mempunyai batas waktu tertentu untuk beroperasi, serta memerlukan perbaikan yang kadangkala juga membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya, disamping biaya-biaya pemeliharaan rutin agar dapat menunjang kegiatan pengoperasiannya.Aset tetap kecuali tanah yang dimanfaatkan oleh perusahaan/instansi pemerintah lama-kelamaan akan mengalami kerusakan atau susut. Oleh karena itu terhadap aset tetap dilakukan penyusutan.

Aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya.

Dalam pengelolaan dan penyajian aset tetap tersebut diperlukan suatu Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset tetap, agar pemerintah mampu mencapai tatakelola keuangan yang baik sesuai dengan ketetapan yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah,

dengan harapan terdapatnya kesamaan pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur, menilai serta menyajikan dan mengungkapkan aset tetap.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI TA 2016 atas laporan keuangan Pemkab Karo TA 2016, Pemkab Karo memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*). Opini Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*) diberikan atas laporan keuangan Pemkab Karo berdasarkan beberapa kriteria atas penentuan opini. Antara lain persediaan dan aset belum diinventarisasi dan dinilai sesuai Standar Keuangan Pemerintah (SAP), terdapat salah saji yang material atau penyimpangan terhadap SAP yang berdampak pada laporan keuangan, informasi yang tidak memadai, temuan kepatuhan maupun Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berpengaruh material sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU No. 15/2004. Langkah perbaikan perlu dilakukan Pemkab Karo, antara lain, penguatan penerapan SAP melalui inventarisasi dan penilaian persediaan dan aset sesuai SAP, penyajian laporan keuangan secara terstruktur dan akurat, penguatan sinergi SKPD dan Inspektorat.

Berdasarkan teori dan uraian di atas penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **"Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo".**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah daerah tidak lepas dari masalah yang merupakan faktor penghambat dalam mencapai tujuan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Moh Nazir, bahwa: **" Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya**

kemenduaan arti (*ambiguty*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*) baik antara kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada".[1]

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu " Bagaimana Akuntansi Aset Tetap padaBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yangdikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntansi Aset Tetap padaBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Penulis

   Penelitiaan ini memperoleh pengetahuan praktik mengenai Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Bagi Instansi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan mengenai Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo. Digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

---

[1] Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam : Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal.111.

Sebagai bahan referensi penelitian dan menambah pengetahuan untuk melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan definisi akuntansi pemerintah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah

"serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengunpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah."[2]

Menurut Revrisond Baswir dalam buku Rachmat mengemukakan bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah adalah **"suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan ekonomi di berbagai**

[2]Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, **PP No 24 Tahun 2005 Tentang SAP**, Jakarta, 2005 hal 2

alternatif tindakan".[3]Sedangkan tujuan laporan keuangan sendiri menurut Kasmir dalam bukunaya analisis laporan keuangan adalah

1. **"Memberikan Informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahan saat ini**
2. **Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiki perusahaan saat ini**
3. **Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari suatu periode tertentu**
4. **Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu**
5. **Memberikan informasi tentang perubahan perubahan yang terjadi terhadap akktiva, passive dan modal perusahaan**
6. **Memberikan informasi tentang kinerja manajeman perusahaan dalam suatu periode**
7. **Memberikan informasi tentang catatan catatan atas laporan keuangan**
8. **Informasi keuangan lainnya"[4].**

2.1.1 Karakteristik Organisasi Pem 6 ı

Menurut Revrisond Baswir dalam buku Rachmat yang berjudul Akuntansi Pemerintahan, mengemukakan karakteristik organisasi yang bersifat nonprofitadalah :

1. **Organisasi nonprofit tidak mempunyai motif mencari laba atau dengan kata lain motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagi organisasi jenis ini;**
2. **Organisasi nonprofit ini dimiliki secara kolektif, artinya hak pemilikan tidak ditunjukkan oleh saham yang dapat dimiliki secara perseorangan yang dapat diperjualbelikan;**
3. **Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi nonprofit ini, tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa barang, uang, atau jasa.[5]**

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Adapun bebarapa tujuan dan fungsi akuntansi pemerintahan dalam hal ini adalah :

1. Pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*)

---

[3]Rachmat, **Akuntansi Pemerintah**, Bandung, 2010 hal 19
[4]Kasmir, **Analisis Laporan keuangan**, Jakarta, 2012 Hal 11
[5]Ibid , hal. 69

Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.2 Akuntansi Aset Tetap

Dalam memahami pengertian akuntansi aset tetap, maka terlebih dahulu kita memahami definisi dari beberapa istilah yang terkait, yang berasal dari pendapat para ahli,Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 :Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adanan Silaban dan Hamonangan Siallagan mengemukakan bahwa :

> **Aktiva tetap (PSAK No. 16) adalah aktiva berwujud yang perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.**[6]

Definisi ini mengartikan bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan normal pemerintahan.Aset tetap dapat digunakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.Sesuai dengan masa manfaatnya dan nilainya yang relatif material bagi pemerintah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 yang termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah :

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.

b. Hak atas tanah.

Sementara, aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*) adalah yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintah.

---

[6]AdananSilaban dan Hamonangan Siallagan, **Teori Akuntansi**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009, hal. 163

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 :

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Kontruksi dalam Pengerjaan.

Penjelasan atas klasifikasi aset tetap diatas adalah :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi,

dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam

pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.

Menurut Baldric Siregar karakteristik aset tetap adalah :

1. Berwujud
2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Merupakan objek pemeliharaan
7. Ada kriteria untuk kapitalisasi menjadi aset tetap

Sedangkan menurut Indra Bastian Dalam bukunya Sistem Akuntansi Sektor Publik " **Aktiva tetap Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun"**[7].

2.2.2 Pengakuan Aset Tetap

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010"Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal".

[7]Indra Bastian, dan Gatot Soepriyanto, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta, 2003 Hal 69

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hokum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. **Berwujud;**
2. **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
3. **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
4. **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**
5. **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;**
6. **Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;**
7. **Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**[8]

2.2.3 Pengukuran Aset Tetap

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010:Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

[8]Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, **Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual ; Berpedoman pada SAP**, Cetakan Pertama: Rosda, Jakarta, 2014, hal. 95

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan , perlengkapan, tenaga listrik, sewaperalatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.2.4 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi.

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Contoh Kasus :

20 Mei 2015, Pemerintah Daerah membeli tanah beserta bangunannya dengan harga Rp. 100.000.000,-. Ditaksir nilai tanah sebesar Rp. 40.000.000,- dan nilai bangunan sebesar Rp. 60.000.000,-.

Tabel 2.1
Jurnal saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut :

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
20 Mei	Tanah	40.000.000	
	Gedung	60.000.000	
	Kas Bendahara Pengeluaran		100.000.000

Sumber : Erlina,dkk.,**Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah,**Usu Press, Medan, 2012, hal. 228

2. Pertukaran Aset Tetap

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa.Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Contoh Kasus :

Awal tahun 2011 Pemda melakukan tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang ditukar adalah Rp 10.000.000,- sedangkan nilai pasar tanah yang didapat adalah Rp 15.000.000,-. Kekurangan sebesar Rp. 5.000.000,- dibayar tunai yang telah dianggarkan dalam belanja modal.

Tabel 2.2
Jurnal saat Bendahara Pengeluaran membayar belanja modal di SKPD sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
20 Mei	Tanah (baru)	15.000.000.000	
	Tanah(lama)		10.000.000.000
	Kas Bendaharan Pengeluaran		5.000.000.000

Sumber : Erlina,dkk.,**Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah,**Usu Press, Medan, 2012, hal. 229

3. Aset Donasi

Aset donasi merupakan sumbangan aset kepada pemerintah tanpa ada persyaratan.Perolehan aset tetap dari donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang diakui sebagai pendapatan operasional.Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Contoh kasus :

Pada tanggal 1 Mei 2012 Pemda memperoleh donasi dari Bank Dunia berupa 5 buah mobil kijang. Mobil kijang dengan tipe dan kriteria yang sama tersebut mempunyai nilai wajar masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,-. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada SKPD.

Tabel 2.3
Jurnal Aset Donasi yang harus dibuat di akuntansi SKPKD adalah :

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
1 Mei	Kendaraan roda 4	120.000.000	
	Ekuitas		120.000.000

Sumber : Erlina,dkk.,**Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah,**Usu Press, Medan, 2012, hal. 228

2.2.5Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masamanfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi atau peningkatan standar kenerja.

Contoh Kasus :

Pada tahun 20X1, Kementerian S melakukan pemeliharaan gedung dan bangunansebagai berikut:

- Tanggal 10 Agustus 20X1 dilakukan kegiatan pemasangan keramik yang semula hanya berupa lantai tanah sejumlah Rp600.000.000 dengan pembebanan pada akun belanja modal gedung dan bangunan.
- Tanggal 10 September 20X1 dilakukan pengecatan gedung sejumlah Rp300.000.000 dengan pembebanan pada akun belanja pemeliharaan.

Atas transaksi tersebut biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi hanyalah biaya pemasangan keramik. Biaya pengecatan gedung diakui sebagai beban tahun berjalan dan tidak perlu dikapitalisasi karena merupakan kegiatan pemeliharaan rutin yang tidak menunjukkan adanya suatu peningkatan mutu/kualitas/kapasitas atas aset yang bersangkutan.

Tabel 2.4
Jurnal yang dibuat oleh Kementerian S

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
10/8/20X1	Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	600.000.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lain *)		600.000.000
	(mencatat biaya pemasangan keramik gedung dan bangunan)		
	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	600.000.000	
	Kas di Kas Umum Negara		600.000.000
	(*jurnal mencatat kapitalisasi biaya pemasangan keramik*)		
10/9/20X1	Belanja Barang	300.000.000	
	Ditagihkan ke Entitas Lain *)		300.000.000
	Beban Pemeliharaan	300.000.000	
	Kas di Kas Umum Negara		300.000.000
	(*mencatat biaya pengecatan gedung*)		

Sumber : Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15

2.2.6 Penyusutan Aset Tetap

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan.

Istilah penyusutan/depresiasi digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aset tetap berwujud yang dapat diganti, seperti gudang, mesin, alat-alat, dan lain-lain. Definisi penyusutan menurut Nurlan Darise dalam skripsi Sandro Dita Maynarsih Zai adalah :

> **…depresiasi/penyusutan digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti, seperti gudang, mesin, alat-alat, dan lain-lain atau penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.**[9]

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusutan, antara lain:

1. Harga perolehan

   yaitu segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap digunakan atau dipakai.

2. Umur ekonomis atau masa manfaat,

   yaitu lamanya aktiva tetap dapat dipakai secara menguntungkan.

3. Nilai residu / nilai sisa,

---

[9]Dita Maynarsih Zai, **Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pernyataan Nomor 07 Pada Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)**, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 20

yaitu nilai dari suatu aktiva setelah habis masa manfaat / umur ekonomisnya.

4. Pola pemakaian

yaitu merupakan metode yang dipakai untuk mengalokasikan harga perolehan (harga pokok) aktiva tetap menjadi biaya selama biaya masa manfaat atau umur ekonomis.

Nilai penyusutan untuk masing-masingperiode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa untuk menghitung penyusutan dapat dilakukan beberapa metode yaitu :**"…Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)/ Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)/Metode unit produksi (*Unit Of Production Method*)".**[10]

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam metode garis lurus, beban penyusutannya dibebankan pada setiap periode akuntansi.Beban peyusutan menurut metode ini, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan/tahun} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Method*)

Dalam metode saldo menurun, beban penyusutan semakin menurun dari tahun ke tahun.Biaya tarif penyusutan yang dikeluarkan adalah dua kali tarif metode garis lurus.

3. Metode unit produksi (*Unit Of Production Method)*

---

[10]Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, **Op.Cit.,** hal 104

Kapasitas produksi suatu aktiva tetap dijadikan pedoman dalam penentuan besarnya depresiasi, dan besarnya produksi yang dilakukan dalam kapasitas produksi tersebut merupakan metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi.

Contoh kasus :

1 Januari 2011, Pemerintah Daerah memiliki bangunan dengan harga beli Rp. 120.000.000,-. Ditaksir memiliki umur ekonomis 12 tahun dengan nilai residu sebesar Rp. 0,- .Metode penyusutan adalah metode garis lurus. Penyusutan gedung pertahun sebesar Rp. 10.000.000,-. Jurnal untuk mencatat penyusutan pada akhir tahun sebagai berikut

Tabel 2.5
Jurnal Penyusutan aset tetap

Tgl	Uraian	Debet	Kredit
31 Des	Beban penyusutan	10.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		10.000.000

Sumber : Erlina,dkk.,**Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah,**Usu Press, Medan, 2012, hal. 231

2.2.7 Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secarapermanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.2.8 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Indra Bastian :

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kassuatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (*wide range users*) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.[11]

Komponen-komponen dalam Laporan Keuangan Sektor Publik yang minimal dan terintegrasi ada 5 jenis, yaitu :

a. **Laporan Posisi Keuangan;**
b. **Laporan Kinerja Keuangan;**
c. **Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto;**
d. **Laporan Arus Kas;**
e. **Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.**[12]

Dari beberapa komponen Laporan Keuangan Sektor Publik tersebut, penyajian aset tetap disajikan pada Laporan Posisi Keuangan.Dalam penyajiannya, kelompok-kelompok aset tetap disajikan dalam akun Aset Tetap dan disajikan sesuai dengan jenis kelompoknya masing-masing.

Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan.

Tabel 2.6
Contoh Laporan Posisi Keuangan

Pemerintah Kota XXX Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X1		
URAIAN	20X8	20X5
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Piutang	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Uang Muka	xxx	xxx
Investasi	xxx	xxx
Total Aktiva Lancar	xxx	xxx
Aktiva Tidak Lancar		
Piutang	xxx	xxx

[11]Indra Bastian, **Op.Cit**, hal. 297
[12]**Loc. Cit**

Investasi	xxx	xxx
Aktiva Keuangan Lainnya	xxx	xxx
Infrastruktur, Pabrik, dan Peralatan	xxx	xxx
Tanah dan Bangunan	xxx	xxx
Aktiva Tidak Berwujud	xxx	xxx
Aktiva Nonkeuangan Lainnya	xxx	xxx
Total Aktiva Tidak Lancar	xxx	xxx
Aktiva Total	**xxx**	**xxx**
KEWAJIBAN		
Kewajiban Lancar		
Utang Usaha	xxx	xxx
Pinjaman Jangka-Pendek	xxx	xxx
Bagian-Lancar Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
Penyisihan (*Provision*)	xxx	xxx
Employee Benefits	xxx	xxx
Pensiun	xxx	xxx
Total Kewajiban Lancar	xxx	xxx
Kewajiban Tidak Lancar		
Utang Usaha	xxx	xxx
Pinjaman	xxx	xxx
Penyisihan *(Provision*)	xxx	xxx
Employee Benefits	xxx	xxx
Pensiun	xxx	xxx
Total Kewajiban Tidak Lancar	xxx	xxx
Kewajiban Total	**xxx**	**xxx**
Aktiva Neto	**xxx**	**xxx**
AKTIVA/EKUITAS NETO		
Modal Sumbangan		
Entitas Pemerintah	xxx	xxx
Cadangan (*Reserves*)	xxx	xxx
Akumulasi Surplus	xxx	xxx
	xxx	xxx
Partisipasi Minoritas	xxx	xxx
Aktiva/Ekuitas Neto Total	xxx	xxx

Sumber : Indra Bastian, **Sistem Akuntasi Sektor Publik**, Edisi Ketiga: Erlangga,Jakarta, 2010

Selain disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pengguna laporan keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan haruslah diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap tentang :

a. **Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);**
b. **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :**
   1). **Penambahan,**
   2). **Pelepasan,**
   3). **Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada,**
   4). **Mutasi aset tetap lainnya.**
c. **Informasi penyusutan, meliputi :**
   1). **Nilai penyusutan,**
   2). **Metode penyusutan yang digunakan,**
   3). **Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,**
   4). **Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;**
d. **Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :**
   1). **Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap,**
   2). **Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap,**
   3). **Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam kontruksi,**
   4). **Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**[13]

Nilai aset tetap yang ada dalam laporan posisi keuangan merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pengguna laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap tersebut.

[13]Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, **Op. Cit.,** hal 107

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang informasi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No.17 Kabanjahe.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gambaran Struktur Organisasi, Laporan Keuangan yang terdiri dari Aset Tetap, Laporan Posisi Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan yang mendukung serta literature lainnya yang relevan pada tahun 2015-2016.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk membahas masalah diatas, diperlukan data yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi , yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian Teknik yang dipakai dalam penelitian adalah pengamatan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.

2. Dokumentasi, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara pengambilan langsung ke objek penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu Metode Analisis Deskriptif dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, dikelompokkan kemudian disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.Dalam proses penelitian ini mengetahui Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Karo yaitu :

1. Pengakuan Aset Tetap
2. Pengukuran Aset tetap
3. Penilaian Awal Aset Tetap, meliputi :
    a. Perolehan Secara Gabungan
    b. Pertukaran Aset Tetap
    c. Aset Donasi

4. Pengeluaran Setelah Perolehan
5. Penyusutan Aset Tetap
6. Penghentian dan Pelepasan
7. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap